

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE:  LISTRIK  MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI  UMUM  
 MIGAS  GEOLOGI  PANSUS ANGKET  
 ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP **OKT** NOV DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 **30** 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

## Pengelolaan Migas Menyimpang

JAKARTA – Pansus Angket Bahan Bakar Minyak (BBM) DPR menemukan berbagai penyimpangan pengelolaan migas, baik di sektor hulu maupun hilir migas. Pada sektor hulu migas, Pansus Angket menemukan inefisiensi pada pengadaan peralatan eksplorasi dan eksploitasi, yang membengkakkan *cost recovery* dan merugikan negara.

Sementara itu, kontrak kontrak migas yang dibuat pemerintah tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan masyarakat, sehingga negara berpotensi dirugikan.

“Hal ini terjadi karena pijakan prinsipil dari pengelolaan migas masih berdasar pada UU Migas No 22 tahun 2001 yang secara substansi sarat dengan kepentingan ekonomi liberal dan intervensi asing,” ujar Ketua Pansus Angket BBM Zulkifli Hasan pada saat Rapat Kerja Pansus Angket dengan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Raden Priyono dan Dirjen Migas Departemen ESDM Evita Herawati Legowo di Jakarta, Selasa (28/10).

Menurut Zulkifli, Panitia

Angket mendorong agar aparat hukum mengusut tuntas berbagai penyimpangan yang terjadi di sektor hilir migas, seperti impor minyak mentah maupun BBM yang tidak transparan.

Kepala Divisi Pusat Data dan Informasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengungkapkan, penyimpangan migas akibat selisih penerimaan negara dari sektor minyak sudah terjadi sejak 1968. Hal tersebut terjadi karena adanya pembengkakan *cost recovery*, tidak dicatatnya penerimaan pajak, dan bonus kewajiban domestik (*domestic market obligation/ DMO*), serta perbedaan angka realisasi *lifting* dan produksi minyak di APBN.

“Pada 2000-2007 saja ICW menemukan adanya indikasi penyimpangan penerimaan negara dari minyak sebesar Rp 194 triliun,” kata dia.

Priyono menjelaskan, laporan migas yang dikeluarkan BP Migas sudah mengikuti data terbaru harian. Anggota Pansus Angket Drajad Wibowo menilai, masalah selisih perhitungan tersebut juga terjadi ketika BPK mengaudit penerimaan migas nasional. (c122)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
**MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE:  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI  
 GEOLOGI

- UMUM  
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP **OKT** NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 **30** 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2008

### UU Migas Baru Akan Diajukan

**PANITIA** Khusus Hak Angket Bahan Bakar Minyak (BBM) akan mengajukan hak inisiatif Rancangan Undang-Undang Migas yang baru untuk membenahi pengelolaan sektor minyak dan gas. Ketua Pansus BBM Zulkifli Hasan mengatakan, langkah itu perlu dilakukan mengingat pengelolaan sumber daya migas masih sarat kepentingan asing.

"Kami menemukan kelemahan prinsipil pada kebijakan migas, khususnya UUNo 22/2001 tentang Migas, selain juga inefisiensi hulu dan hilir migas," ujarnya belum lama ini. Menurut dia, saat ini hak inisiatif tersebut masih dalam proses.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST
---	--

KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input checked="" type="checkbox"/> PANSUS ANGKET
--	---	--

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	<b>OKT</b>	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	<b>30</b>	31

HALAMAN : 6 TAHUN 2008

### HAK ANGKET BBM

## Pansus DPR Ajukan UU Migas Baru

JAKARTA (Suara Karya): Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bahan Bakar Minyak (BBM) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengajukan hak inisiatif Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas (Migas) yang baru.

Ini dilakukan untuk membenahi pengelolaan sektor migas, apalagi pengelolaan sumber daya migas selama ini masih syarat kepentingan asing. "Kami menemukan kelemahan prinsipil pada kebijakan migas, khususnya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Selain itu, juga inefisiensi hulu dan hilir migas," kata Ketua Pansus Hak Angket BBM DPR Zulkifli Hasan, di Jakarta, kemarin.

Usulan tersebut mengemuka setelah Pansus BBM menggelar rapat dengan Dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Evita H Legowo, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) R Priyono, dan pengurus Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta, Selasa (28/10) lalu. Namun, menurut Zulkifli,

saat ini hak inisiatif tersebut masih dalam proses.

Sementara itu, anggota Pansus Hak Angket BBM Dradjad Wibowo juga mengatakan, revisi UU Migas dilakukan agar pengelolaan migas lebih transparan, khususnya terkait kontrak, sehingga pengawasan bisa lebih lancar. "Rasanya perlu ada revisi UU Migas sehingga kita

**"Kami menemukan kelemahan prinsipil pada kebijakan migas, khususnya UU Nomor 22 Tahun 2001"**

Zulkifli Hasan  
Ketua Pansus Hak Angket BBM DPR

bisa tahu kontrak per kontrak yang dibuat pemerintah dengan kontraktor," ujar Dradjad.

Dia juga menegaskan, tugas DPR adalah melakukan pengawasan. Tetapi jika isi kontrak tidak diketahui tentu pengawasan tidak dapat dilakukan. "Itu

pun pengawasan ekspose yang dilakukan setelah kontrak ditandatangani. Jadi bagaimana kita bisa mengawasi kontrak sebelum ditandatangani kalau klausul dan butirnya saja kita tidak tahu," ujarnya.

Terkait dengan temuan ICW yang menyebutkan indikasi penyimpangan penerimaan negara dari sektor minyak senilai Rp 194 triliun selama 2002-2007, Kepala BP Migas R Priyono membantahnya. Menurut dia, indikasi penyimpangan tersebut karena dasar penghitungan yang digunakan ICW berbeda dengan BP Migas. "Perbedaan yang mendasar antara lain karena ICW menggunakan angka produksi. Sedangkan kami angka *lifting* (produksi riil)," ujarnya.

Menurut Priyono, hal tersebut juga menyebabkan perbedaan angka biaya pemulihan (*cost recovery*), meski memang ada perbedaan penghitungan antara BP Migas dan Departemen ESDM. "BP Migas sudah memasukkan angka *cost recovery* Pertamina, sedangkan Departemen ESDM belum," kata dia. (A Choir)